



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 15
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / ke-6
Dengan	: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 27 September 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. Noor Achmad, MA.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K-L) Tahun Anggaran 2018
Hadir	: 1. orang dari 48 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Sekretaris Jenderal Kemenag RI beserta jajaran, 3. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI beserta jajaran, 4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta jajaran, 5. Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Kemenag RI beserta jajaran,

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Noor Achmad, MA. sesuai tempat dan acara tersebut di atas.
3. Rapat sempat diskors pada pukul 13.30WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 14.40WIB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretariat Jenderal, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI dengan agenda “**Pendalaman RKA-K/L Tahun 2018**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 sebesar **Rp 2.220.489.530.000,-** (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.135.616.240.000
2	Program Kerukunan Umat Beragama	84.873.290.000
Jumlah		2.220.489.530.000

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun 2018 sebesar **Rp 5.130.689.598.000,-** (Lima Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang dialokasikan untuk kegiatan :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	44.750.000.000
2	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	988.180.204.000
3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	349.559.000.000
4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	93.122.015.000
5	Dukungan Manajemen	3.655.078.378.000
Jumlah		5.130.689.598.000

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp 1.085.824.226.000,-** (Satu Triliun Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), yang dialokasikan untuk kegiatan :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	6.284.780.000
2	Pelayanan Haji Dalam Negeri	375.927.230.000
3	Pembinaan Haji	230.448.840.000

4	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	45.871.286.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	409.318.966.000
6	Pelayanan Haji Luar Negeri	15.473.124.000
7	Pelayanan Atas Haji di Jeddah	2.500.000.000
Jumlah		1.085.824.226.000

4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp 17.000.000.000,-** (Tujuh Belas Miliar Rupiah), yang dialokasikan untuk pegawai dan operasional dengan menyempurnakan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
5. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran tahun 2018 untuk Satuan Kerja Kementerian Agama RI sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI sebesar **Rp 159.180.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang dialokasikan untuk :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Sarana Prasarana Perkantoran dan Rehabilitasi Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	61.680.000.000
2	Assesment pegawai dan rekrutmen terbuka jabatan tinggi	15.000.000.000
3	Penguatan Inventarisasi Barang Milik Negara, Satker yang dilikuidasi, dan Penertiban Aset	15.000.000.000
4	Pembinaan di bidang Hukum dan KLN,	8.000.000.000

	Penyusunan naskah peraturan perundang-undangan, Penanganan Pornografi	
5	Pemantapan Reformasi Birokrasi Pusat dan daerah	15.000.000.000
6	Penguatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, Pengembangan sistem dan data perencanaan, Evaluasi program, dan Koordinasi Lintas Sektor	10.000.000.000
7	Pembangunan Jaringan Infrastruktur Data dan Informasi	15.000.000.000
8	Fasilitas Pelayanan Publik	10.000.000.000
9	Penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme	7.500.000.000
10	Peningkatan Pelayanan Agama Khonghucu	2.000.000.000
Jumlah		159.180.000.000

b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebesar

Rp 913.132.302.000,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) yang akan dialokasikan untuk :

- 1) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebesar Rp 58.240.000.000,-
- 2) Pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga sakinah sebesar Rp 391.563.000.000,-
- 3) Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam sebesar Rp 377.858.702.000
- 4) Pengelolaan urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebesar Rp 59.712.600.000,-
- 5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 25.758.000.000,-

c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar

Rp 542.100.531.370,- (Lima Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang akan dialokasikan untuk :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelesaian dokumen dan perlengkapan jemaah haji	1.861.667.000
2	Pelatihan dan pembekalan petugas kloter	1.090.000.000
3	Pengadaan seragam petugas kloter	250.000.000
4	Biaya tiket dan uang saku petugas haji kloter	12.960.992.000
5	Honorarium tenaga musiman Arab Saudi	10.688.600.000
6	Biaya visa petugas haji	24.990.000.000
7	PPIH embarkasi dan Pusat	9.148.741.000
8	Realokasi Indirect Cost BPIH	481.110.531.370
Jumlah		542.100.531.370

6. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar

Rp 193.651.436.080,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang akan dialokasikan untuk kegiatan :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan dan Pembinaan registrasi dan Sertifikasi	37.410.343.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	66.868.190.000
3	Pengelolaan Kerjasama dan Standarisasi	17.585.124.640
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	71.787.778.440
Jumlah		193.651.436.080

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan mengajukan pendalaman lebih lanjut terkait usulan tambahan anggaran BPJH.

7. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jendral, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut :
 - a. Memperbaiki rencana kerja dan anggaran berdasarkan aspirasi daerah.
 - b. Mempercepat proses pengalokasian anggaran transisi (Jun-Des 2017) untuk BPKH dalam rangka melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan untuk bisa menerbitkan PMA.
 - c. Mempercepat pembangunan KUA di seluruh Indonesia.
 - d. Melakukan pendataan terhadap KUA yang berstatus pemberian wakaf di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 - e. Mendorong Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI untuk melakukan koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pengalihan fungsi lahan bagi kepastian KUA di daerah-daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - f. Melakukan realokasi anggaran untuk meningkatkan program Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

- g. Melakukan peningkatan anggaran untuk program bantuan Masjid.
- h. Memberi rencana detail terhadap pembangunan asrama haji yang bersumber dari SBSN tahun 2018 di 8 (Delapan) lokasi dan memastikan ketersediaan lahan BMN Kementerian Agama RI untuk pembangunan asrama haji di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang), Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Barat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA,

Dr. H. NOOR ACHMAD, MA

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI,**

Prof. Dr. NUR SYAM, MA

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,**

Prof. Dr. MUHAMMADIYAH AMIN

**DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI,**

**KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL KEMENTERIAN
AGAMA RI,**

Prof. Dr. NIZAR ALI, M.Ag.

Prof. Ir. SUKOSO, M. Sc., Ph. D